

Sudut Pandang Islam Dalam Politik

Muhammad Roisuddin *1

Dimas Syahreza ²

Ricko Sunandar³

Rahmat Saefullah⁴

Wahyu Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*e-mail: idederreza@gmail.com¹, dimassyah136@gmail.com², ricko.sunandar28@gmail.com³,
4keysss33@gmail.com⁴, wahyu.hidayat@uinbanten.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini membahas peran politik dalam Islam sepanjang sejarah dengan fokus pada evolusi sistem pemerintahan, teori politik, dan pandangan politik dalam konteks Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur ilmiah terkait. Artikel juga mengulas peran penting dua tokoh, yaitu Syafi'i Ma'arif dan Harry J. Benda, dalam pemahaman politik Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan perubahan dalam pemikiran politik Islam dari masa ke masa, termasuk pergeseran dari model demokratis ke aristokrat demokratis, serta keragaman dalam pandangan politik di negara-negara Islam. Selain itu, artikel ini menggambarkan pengaruh Islam di luar Pulau Jawa terhadap politik Indonesia. Kajian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas politik dalam Islam dan relevansinya dengan realitas politik saat ini di negara-negara Islam.

Kata kunci: Politik Islam, Sejarah Politik Islam, Sistem Pemerintahan Islam.

Abstract

This article discusses the role of politics in Islam throughout history with a focus on the evolution of government systems, political theories, and political views in the Islamic context. This study uses a qualitative approach with a literature study method, collecting data from relevant scientific literature sources. The article also reviews the important role of two figures, namely Syafi'i Ma'arif and Harry J. Benda, in the understanding of Islamic politics in Indonesia. The results show changes in Islamic political thought over time, including a shift from democratic to aristocratic democratic models, as well as diversity in political views in Islamic countries. In addition, the article describes the influence of Islam outside Java on Indonesian politics. This study provides insight into the complexity of politics in Islam and its relevance to current political realities in Islamic countries.

Keywords: Political Islam, History of Political Islam, Islamic System of Government.

PENDAHULUAN

Politik merupakan ranah yang mendalam dan kompleks dalam kehidupan manusia. Perkembangan isu-isu politik memengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari kebijakan pemerintah hingga perubahan sosial dan ekonomi. Politik memiliki dampak yang sangat luas, baik yang dirasakan secara langsung melalui pengaruh kebijakan pemerintah maupun yang bersifat tidak langsung melalui perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan dinamika sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan penggunaan model-model kajian yang cermat menjadi sangat penting. Dalam pemahaman ini, studi ilmiah tentang politik memegang peran sentral. Kajian politik adalah alat yang memungkinkan kita untuk menjelajahi berbagai aspek politik dan memahami bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Sistem politik yang digunakan oleh suatu negara menjadi elemen kunci dalam pemahaman politik. Sistem politik mengatur bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, dan diimplementasikan. Ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan politik, peran lembaga-lembaga pemerintah, dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan tatanan kenegaraan menjadi penting dalam analisis politik. Dalam pemahaman ini, agama juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik dan etika di masyarakat.

Di dalam konteks Islam, agama ini mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Namun, terdapat beragam pandangan dalam dunia Islam mengenai peran agama dalam politik. Beberapa pemikir Islam seperti Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, Maulana Maududi Syaikh, dan Syaikh Hasan Al Bana berpendapat bahwasannya Islam tidak hanya seputar agama yang mengelola ikatan Tuhan dengan makhluknya. Mereka melihat Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif yang memberikan panduan untuk seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pemerintahan negara. Mereka menegaskan bahwa Islam memiliki hukum yang komprehensif yang mencakup peraturan untuk sistem politik dan tatanegara.¹

Pandangan ini menghasilkan pandangan bahwa sistem kenegaraan Islam harus mengikuti model yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, pemahaman ini menekankan pentingnya memulihkan prinsip-prinsip kenegaraan Islam sebagai bagian integral dari pemikiran politik Islam, tanpa harus meniru atau mengeksport model-model tata negara Barat. Pandangan ini menciptakan perdebatan dan persaingan di antara para pemikir politik Islam mengenai bagaimana model kenegaraan yang ideal seharusnya.

Namun, permasalahan ini adalah aspek yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta metodologi kajian yang cermat. Oleh karena itu, studi tentang model-model kajian politik menjadi sangat penting. Model-model kajian adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengorganisasi data, mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terlewatkan, dan memahami hubungan sebab-akibat dalam politik. Studi tentang model-model kajian politik membantu kita mengidentifikasi berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji fenomena politik dengan lebih baik.

Melalui artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai model kajian politik yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu politik, termasuk pemahaman politik Islam dan isu-isu tatanegara. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, kita akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap model kajian dan melihat bagaimana model-model ini dapat diterapkan dalam konteks politik global yang beragam.

Dengan begitu, kita akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang politik, memahami peran agama dalam politik, dan bagaimana model kajian politik dapat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dalam politik kontemporer. Melalui upaya ini, kita dapat berkontribusi pada pemahaman politik yang lebih baik dan pada pembangunan masyarakat yang lebih stabil dan berkeadilan.²

METODE

Dalam kajian ini, metode kajian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali kerumitan isu-isu politik serta mengungkap nuansa yang mungkin terabaikan dalam metode kuantitatif yang lebih terstruktur. Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan dalam menjelajahi berbagai sudut pandang dan pemahaman yang relevan dengan isu-isu politik yang sedang diteliti.

Studi kepustakaan, yang juga dikenal sebagai library research, menjadi metode inti dalam pengumpulan data dalam kajian ini. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan pengkaji untuk menggali pemahaman teoritis yang mendalam dan merinci referensi yang berhubungan dengan standar, budaya, dan politik yang berkembang dalam konteks sosial yang menjadi fokus kajian.

Dalam konteks studi kepustakaan ini, kami melakukan penelusuran yang cermat terhadap buku-buku, literatur ilmiah, artikel, dan sumber-sumber teoretis yang relevan dengan topik kajian kami. Data yang diperoleh dari literatur ini menjadi landasan penting dalam membangun argumen dan analisis kami mengenai isu-isu politik yang relevan, terutama dalam kerangka prinsip-prinsip Islam.

¹ Ridwan, "Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 223–36.

² Universitas Islam Indonesia, "Menilik Isu Agama Dalam Dunia Politik," uii.ac.id, 2021, <https://www.uii.ac.id/menilik-isu-agama-dalam-dunia-politik/>. Diakses pada tanggal 14 November 2023

Dalam mempertimbangkan metode kajian ini, kami berusaha untuk memahami kompleksitas hubungan antara Islam dan politik dalam konteks masyarakat kontemporer. Kami berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul melalui pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis yang ada, serta melalui penelusuran referensi dan pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran politik Islam yang telah ada.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa studi ini juga memperhatikan aspek etika kajian dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mungkin terkandung dalam literatur yang digunakan. Kami juga berkomitmen untuk menjaga keakuratan dan validitas analisis kami serta menghormati hak cipta yang berlaku dalam penggunaan literatur yang dijadikan sumber.

Dengan menggunakan metode kajian ini, kami bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara Islam dan politik, serta implikasinya dalam masyarakat kontemporer. Harapannya, hasil kajian ini akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemahaman politik dan pengembangan masyarakat yang lebih stabil serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, terutama dalam konteks agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini menyajikan hasil kajian yang mengungkap peran politik dalam Islam sepanjang sejarah dengan cara yang lebih mendalam. Awalnya, Islam dianggap sebagai agama dan sistem pemerintahan yang terintegrasi, di mana Rasulullah Muhammad SAW memimpin negara sebagai pemimpin tunggal. Namun, setelah wafatnya Rasulullah, model pemerintahan bertransformasi dari demokratis menjadi aristokrat demokratis yang melibatkan pemilihan Khalifah melalui syura, atau musyawarah, yang melibatkan para pemimpin komunitas Muslim.

Seiring berjalannya waktu, sejarah Islam mencatat dinamika politik yang mengguncang umat Islam, mengarah pada perpecahan dan konflik. Berbagai model pemerintahan muncul di berbagai negara Islam, mencerminkan keragaman pendekatan politik dalam Islam. Ada negara-negara yang mengadopsi sistem kerajaan, di mana kepemimpinan diwariskan melalui garis keturunan, sementara negara-negara lain memilih model republik yang melibatkan pemilihan pemimpin. Bahkan, ada yang memilih model republik Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Selain keragaman model pemerintahan, teori politik dalam Islam juga memengaruhi pandangan politik. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal siapa yang memiliki kualifikasi untuk memimpin dan bagaimana kepemimpinan harus dijalankan. Beberapa teori politik menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan kompeten yang harus memimpin berdasarkan etika Islam. Di sisi lain, ada pandangan yang memberikan penekanan pada kewenangan pemerintah yang lebih luas dengan pemimpin yang memiliki otoritas yang lebih besar.

Dalam konteks saat ini, pandangan yang menekankan etika dan prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, tampaknya lebih sesuai dengan realitas di mana negara-negara Islam memiliki berbagai model pemerintahan yang mencerminkan keragaman pandangan dalam Islam tentang urusan negara. Oleh karena itu, hasil kajian ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang evolusi peran politik dalam Islam dan kompleksitas kerangka pemikiran politik yang membentuk pandangan Islam tentang urusan negara. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pemahaman ini juga dapat menjadi dasar bagi perdebatan lebih lanjut dan kajian lanjutan tentang hubungan antara Islam dan politik.

Pengertian Politik

Terdapat sebuah Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta yang menjelaskan bahwasannya politik didefinisikan seperti pemahaman tentang urusan negara, sebagai tata aturan pemerintahan, prinsip-prinsip pemerintahan, dan sejenisnya. Politik juga bisa merujuk pada semua keperluan, kebijakan, serta strategi yang berkaitan dengan pemerintahan sebuah negara atau dalam hubungannya dengan negara yang lainnya.³

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Sistem politik adalah suatu konsep yang mencakup aspek-aspek seperti sumber kekuasaan negara, pelaksana kekuasaan, dasar, proses penentuan, pemberian kewenangan, tanggung jawab, dan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan negara.⁴ Didalam konteks bahasa Arab, istilah politik dijelaskan dengan menggunakan kata "al-siyasah" dan "daulah". Awalnya, kedua istilah ini tidak ditujukan secara eksklusif untuk masalah politik. Misalnya, "siyasah" pertama kali ditemukan dalam konteks hukum ketika membahas masalah kepemimpinan (imamah), yang mengarah pada konsep Fiqih Siyasah dalam fiqih. Kata "daulah" juga awalnya digunakan dalam Alquran untuk merujuk pada kepemilikan kekayaan diantara orang-orang kaya, berharap harta tersebut akan beredar juga tidak hanya menjadi milik orang-orang kaya. Demikian pula, dengan kata "keadilan" dan "musyawarah" banyak digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan awalnya tidak dikaitkan dengan politik secara langsung.⁵

Eksistensi Politik dalam Islam

Dalam komunitas Muslim umumnya, terdapat sedikit perhatian terhadap keterkaitan antara masalah politik dan agama. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep Islam itu sendiri. Sebagai contoh, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa banyak orang, termasuk yang menganut Islam, sering tidak menyadari bahwasannya Islam tidak semata-mata tentang agama, tapi juga tentang suatu komunitas atau umat-umat yang memiliki kepentingan, pemahaman, serta maksud politik internalnya. Meskipun mereka adalah penganut Islam, seringkali mereka hanya menganggap Islam sebagai urusan individu, lupa bahwa Islam juga memiliki dimensi kolektif. Sebagai suatu komunitas, Islam memiliki kesadaran kolektif, struktur, dan kemampuan untuk melakukan tindakan bersama.⁶

Kuntowijoyo secara meyakinkan membuktikan pandangan atau teori ini pada buku miliknya, menunjukkan adanya konsep politik yang kuat dalam Islam. Keterkaitan antara Islam dengan politik juga terlihat dari analisis pada buku "Dari Berbagai Aspeknya Jilid II" yang ditulis oleh Harun Nasution. Dijelaskan dalam bukunya, Harun Nasution menegaskan bahwa permasalahan pertama dalam sejarah Islam bukanlah seputar keyakinan, tetapi masalah politik.⁷ Ketika Nabi Muhammad Saw. di Madinah, ia bukan menjadi Rasul Allah saja, melainkan juga pemimpin negara. Karena ia menjadi kepala negara, setelah wafatnya Nabi, seseorang harus menggantikannya untuk menjadi pemimpin di negara yang ditinggalkannya. Beberapa pengkaji sejarah politik mendefinisikan pendekatan politik Nabi Muhammad sebagai teodemokratis, yaitu pola pemerintahan yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sebelum mencari ketentuan dari Tuhan. Sebab ini dikarenakan dimasa Nabi Muhammad, wahyu terus saja turun.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, kepemimpinan negara dengan berturut-turut dikuasai oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Cara pemerintahan yang diterapkan oleh keempat khalifah ini berbeda dengan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw. Selama masa pemerintahan mereka, pemerintahan mengikuti model aristokrat demokratis, yaitu suatu sistem yang dalam menyelesaikan masalah melibatkan musyawarah di antara para anggotanya yang terdiri dari kalangan aristokrat.

Konflik di antara umat Islam dimulai pada masa pemerintahan Usman Ibn Affan dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah, hanya Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meninggal secara wajar, sedangkan Umar Ibn Al-Khattab, Usman Ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib meninggal karena pembunuhan. Salah satu penyebabnya adalah bahwa pemerintahan Usman dianggap tidak adil, terutama karena politik nepotisme yang diterapkan, yang mendapat reaksi negatif dari sebagian sahabat Nabi.⁸

Sebagai respons terhadap situasi ini, sekitar lima ratus pemberontak dari Mesir bergerak menuju Madinah. Perkembangan di Madinah kemudian berujung pada pembunuhan Usman oleh

⁴ Muunawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990).

⁵ Lihat QS. Syura, 42:28; QS Al-Nahl, 16: 90; QS Al-Hasyr, 59:7

⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1979).

⁸ Abu Laila and Muhammad Tohir, *Yaum Al-Islam* (Bandung: Rosa, 1987).

para pemimpin pemberontak tersebut. Setelah Usman meninggal, Ali bin Abi Thalib menggantikannya, tetapi segera menghadapi tantangan dari kelompok yang juga ingin memegang jabatan khalifah, terutama Talhah dan Zubair dari Makkah, yang didukung oleh Aisyah. Terdapat juga tantangan dari Mu'awiyah, Gubernur Damaskus, yang pada akhirnya menghasilkan perundingan arbitrase yang mengalahkan Ali dalam hal politik dan diplomasi. Situasi ini memunculkan kelompok Khawarij, yang keluar dari barisan Ali, sementara yang tetap setia padanya membentuk aliran syi'ah, dan mayoritas umat Islam lainnya mengidentifikasi diri sebagai kaum Sunni. Pembagian umat ini berdampak besar pada perkembangan ajaran agama Islam.

Selanjutnya, kekhalifahan digantikan oleh kelompok Bani Umayyah yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, bentuk pemerintahan mengalami perubahan menjadi sebuah kerajaan, di mana kepala negara tidak lagi dipilih melalui musyawarah demokratis, melainkan secara otokratis dengan penunjukan putra mahkota.

Pola pemerintahan yang sama berlanjut pada masa Bani Abbasiyah, yang juga mengadopsi sistem kerajaan otokratis. Namun, setelah Bani Abbasiyah dihancurkan pada tahun 1258 oleh serbuan bangsa Mongol, pemerintahan Islam berubah menjadi bentuk kesultanan. Ini terjadi dalam bentuk tiga kesultanan yakni Kesultanan Usmani, Safawi, dan Moghul, yang menetapkan sistem kerajaan.

Kemudian ketiga kesultanan tersebut runtuh, banyak negara Islam jatuh ke tangan para penjajah Barat dan mengikuti pola aturan yang diperkenalkan oleh penjajah. Kemudian era penjajahan Barat berakhir pada akhir abad kesembilan belas, negara-negara Islam mengadopsi beragam bentuk sistem pemerintahan. Sebagai contoh, Indonesia mengadopsi Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, sementara Saudi Arabia, Yordania, Yaman, dan Maroko tetap mempertahankan sistem kerajaan. Negara-negara seperti Irak, Iran, Mesir, dan Pakistan memilih bentuk Negara Republik Islam, sedangkan Brunei Darussalam dan Malaysia menggabungkan unsur-unsur kerajaan dengan sistem republik.

Berdasarkan penyelidikan sejarah di atas, Islam sejak awalnya telah mengenali bentuk pemerintahan dan memiliki pemahaman tentang aturan politik. Disamping itu, data sejarah ini juga memperlihatkan bahwasannya Islam bersifat fleksibel dalam menerima berbagai bentuk dan sistem pemerintahan, selama pemerintahan itu dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh masyarakat.

Unsur politik dalam Islam juga tercermin dalam berbagai teori politik yang muncul, terutama konsep Imamiyah dan khilafah yang diusulkan oleh bermacam-macam aliran. Beberapa aliran teologi, filsuf dan bahkan politik juga membahas isu-isu politik. Sebagai contoh, kaum Syi'ah berpendapat bahwa kepemimpinan haruslah berlandaskan dari ajaran Ali bin Abi Thalib, sementara kaum Sunni tidak mengakui pandangan tersebut. Menurut mereka, Ali beserta keturunannya dianggap sebagai individu yang sejajar seperti tokoh Abu Bakar, Umar, begitu juga Usman. Maka sebab itu, dalam teori mereka, peran Kepala Negara tidak harus diperuntukkan khusus kepada Ali atau keturunannya saja, tetapi hanya harus berasal dari suku Quraisy. Bahkan kriteria ini dapat diperluas menjadi kriteria yang bersifat kualitatif. Sebagai contoh, dalam karyanya "al-Ahkam al-Sultaniyah," Al-Mawardi menyatakan bahwa khalifah harus memenuhi persyaratan seperti adil, berpengetahuan, mampu melakukan ijtihad, sehat secara mental dan fisik, serta memiliki keberanian dan ketegasan. Imam ini dipilih oleh individu yang berhak memilih, yaitu orang-orang yang dijuluki sebagai *Ahl al-ball wa al-'aqd*, yang memiliki pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk menjadi khalifah dan kemampuan untuk bijaksana menentukan calon yang paling layak untuk jabatan tersebut.⁹

Di sisi lain, dalam kaum Khawarij, ada seseorang yang menyatakan bahwa para rakyat dapat menggulingkan para khalifah jika dinilai telah melenceng dari aturan-aturan Islam yang dipercaya sebagai yang tepat. Sementara itu, dari perspektif Sunni, tokoh seperti Al-Ghazali¹⁰ berpendapat bahwa khalifah tidak boleh digulingkan, bahkan jika mereka diktator. Al-Ghazali

⁹ Abi Al-Hasan Ali, *Al-Abkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyat* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960).

¹⁰ Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*.

menekankan bahwa menggulingkan seorang khalifah yang kuat, meskipun zalim, dapat mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Al-Ghazali lebih memprioritaskan kestabilan masyarakat. Pada masa Bani Abbas, terdapat contoh sultan-sultan yang memiliki kekuasaan di samping khalifah-khalifah yang lemah, bahkan ada khalifah yang hanya berperan sebagai figur simbolis dalam kendali sultan, seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution.¹¹

Di samping para teolog, tokoh filosof Islam juga menggambarkan isu politik dalam Islam. Sebagai contoh, Al-Farabi telah meninggalkan sebuah karya dengan judul "al-Madinah al-Fadilah" (Negara Terbaik), yang mana beliau menyatakan bahwasannya negara terbaik yaitu yang dipimpin oleh sang Nabi. Namun, dikarenakan zaman Nabi Muhammad sudah berakhir, negara yang terbaik berikutnya yaitu yang dipimpin oleh para filsuf Islam. Begitu pula dengan Ibnu Sina, ia memiliki pendapat yang sama yaitu negara terbaik ialah yang dipimpin oleh sang Nabi, dan kemudian oleh seorang filsuf. Khalifah harus memiliki keahlian dalam hukum (syariah), memprioritaskan masalah spiritual dan moral, serta harus bersikap adil. Mereka bertanggung jawab memimpin umat menuju kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.¹²

Kemudian, berdasarkan kajiannya, Munawir Sjadzali menyatakan dalam masyarakat Islam ada tiga pandangan berbeda perihal hubungan diantara Islam dengan pemerintahan.

1. Pandangan Pertama

Pandangan pertama menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama dalam arti Barat, melainkan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan negara. Mereka meyakini bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mencakup sistem pemerintahan Islami yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan empat khalifah al-Rashidun. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini termasuk Syaikh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana A.A. Maududi.

2. Pandangan Kedua

Pandangan kedua menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat dan tidak terlibat dalam urusan kenegaraan. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul biasa yang hanya memiliki tugas untuk memimpin manusia menuju kehidupan yang baik dengan mempromosikan moralitas yang tinggi, karena Nabi tidak diciptakan untuk membangun dan memimpin negara.

3. Pandangan ketiga

Pandangan ketiga tidak menerima ide jika Islam termasuk agama yang menyediakan sistem pemerintahan. Mereka juga menolak pandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Pandangan ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan tetapi terdapat seperangkat nilai etika untuk kehidupan berkenegaraan. Tokoh terkemuka dari aliran ini termasuk Mohammad Husein Haikal, karyanya yaitu *Fi Manzil al-Wahyi dan Hayatu Muhammad*.¹³

Evolusi pemikiran politik dalam konteks Islam, mencakup berbagai mazhab, aliran, dan golongan.¹⁴ Di era modern, dengan tantangan kolonialisme dan modernisme, pemahaman tentang aliran pemikiran Islam menjadi semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang dapat diambil adalah menganggap semua aliran tersebut sebagai bagian dari Islam tanpa mengecualikan salah satu. Namun, dalam praktiknya, masyarakat setempat dapat memilih aliran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pandangan ketiga, yang menyatakan bahwa Islam tidak mewajibkan sistem pemerintahan tertentu, tampaknya cocok dengan situasi di lapangan, di mana negara-negara mayoritas Muslim menerapkan berbagai sistem pemerintahan seperti kerajaan dan republik.

Model-Model Kajian Politik

¹¹ Nasution.

¹² Ibid, hlm. 105.

¹³ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*.

¹⁴ Muhammad Al-Bahi, *Pemikiran Islam Dan Pengembangannya* (Jakarta: Resalah, 1985).

Dalam kajian politik, Alfian berpendapat tentang bermacam-macam pendekatan yang bisa digunakan, seperti melihat aspek struktur politik, kekuasaan, komunikasi politik, partai politik, pendekatan dan sosialisasi politik, konstitusi, kebudayaan politik serta pemikiran politik.¹⁵ Berbagai pendekatan ini penting sekali untuk dipahami sebagai alat menganalisis model pendekatan politik yang dilakukan oleh pengkaji lain seperti M. Syafi'i Ma'arif dan Harry J. Benda.

1) Syafi'i Ma'arif

Syafi'i Ma'arif, dalam kajiannya tentang politik, menghasilkan buku berjudul "Islam dan Masalah Kenegaraan" pada tahun 1985. Ia memulai laporan kajiannya dengan menjelaskan substansi ajaran Alquran tentang masalah ketatanegaraan. Ia menyatakan perlunya pemahaman yang mendalam dan sistematis terhadap ajaran Islam untuk menghadapi masalah-masalah modern seperti kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan keadilan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Syafi'i Ma'arif juga menyoroti perbedaan antara Islam sebagai cita-cita ideal dan praktiknya dalam sejarah. Ia menyatakan perlunya hubungan yang positif antara keduanya agar Islam dapat menghadapi tantangan dunia modern.¹⁶

Kajiannya berfokus pada sejauh mana pemahaman ulama dan intelektual Muslim Indonesia terkait dengan ajaran etika Alquran dan Sunnah Nabi yang sejati dan bagaimana pemahaman tersebut berkaitan dengan realitas sejarah perpolitikan umat Islam di Indonesia.

Melalui metode pendekatan normatif historis dan kajian kepustakaan, Syafi'i Ma'arif menjelajahi dunia politik Islam sejak abad ke-20. Hasil kajiannya terdiri dari lima bab yang membahas teori politik Islam, sejarah Islam di Indonesia, Islam sebagai kekuatan pembebas, pengajaran Islam menjadi dasar negara, dan prospek Islam di Indonesia.¹⁷

Syafi'i Ma'arif juga mengemukakan tiga hipotesis terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, Islam di Indonesia berkembang secara dinamis. Kedua, usaha untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam belum realistis karena kurangnya fondasi intelektual keagamaan. Ketiga, masa depan Islam di Indonesia sangat bergantung pada pemahaman cendekiawan, umat Islam terhadap realitas sosial serta hubungannya dengan ajaran Islam.¹⁸

Model kajian politik Syafi'i Ma'arif, yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif historis, dapat menjadi contoh yang baik bagi pengkaji selanjutnya. Kajian ini menggunakan data dari kajian kepustakaan dan secara jelas menyajikan latar belakang, tujuan, kerangka teori, dan manfaat kajiannya.

2) Harry J. Benda

Kajiannya di bidang politik yang menggunakan pendekatan historis normatif juga diterapkan oleh Harry J. Benda. Ini bisa dilihat pada sebuah karyanya dengan judul "Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang," yang diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae dari judul aslinya, "The Crescent and The Rising Sun," dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1980.

Kajian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dari beberapa sumber pasca perang dengan tujuan memperbaiki pemahaman yang sudah muncul dari kajian mengenai berbagai catatan masa pendudukan. Menurut Benda, penaklukan Jepang di Indonesia terjadi secara umum, dan dikatakan perkembangan agama Islam terkhusus semasa periode tersebut, belum banyak menerima perhatian dari penulis-penulis Indonesia yang lain.

Sepemikiran terhadap upaya ini, kajian yang dilakukan olehnya mencoba memberikan analisis sosio-historis perihal elit Islam dan didalam lingkup yang begitu kecil, perihal elit-elit nonreligius yang bertanding dalam politik Indonesia di tangan penguasaasing. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada peran yang ditanggung dari pimpinan rakyat Islam oleh para penjajah

¹⁵ Alfian, *Politik Kebudayaan Dan Manusia Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1981).

¹⁶ Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Konstituante Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

¹⁷ Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LPJES, 1987).

¹⁸ Abdullah.

berurutan dan pemimpin Islam yang dilibatkan oleh konstelasi kekuasaan, aristokrat Indonesia, serta para sosok gerakan nasionalis Indonesia sepanjang zaman tersebut.

Dalam hal cakupan, kajian ini terutama memperhatikan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Keterbatasan informasi yang tersedia sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber yang dapat diakses. Terutama pada masa pendudukan Jepang, dokumentasi tertulis mengenai sebagian besar pulau-pulau, kecuali beberapa kasus kecil, tidak dapat diakses oleh para peneliti. Meskipun dampak masa pendudukan Jepang terhadap Islam di Indonesia telah dijelaskan dalam tulisan-tulisan Belanda, terutama di Aceh, yang merupakan wilayah Sumatera yang kental dengan keislamannya, situasi kehidupan masyarakat Islam di daerah lain di Nusantara, terutama di sepanjang Pantai Barat Sumatra, masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

Dalam bagian awal kajian ini, pengkaji mencantumkan referensi singkat mengenai wilayah tersebut, yang tampaknya berguna untuk membandingkan dan mempertimbangkannya dengan situasi di Jawa. Namun sayangnya, pengkaji tidak memiliki sumber daya untuk mengeksplorasi lebih lanjut era Jepang di wilayah ini.

Dalam konteks penelitian ini yang menekankan aspek politik Islam Indonesia, generalisasi menjadi tak terhindarkan. Diskusi semacam itu mungkin tidak memperhatikan variasi regional yang ada dalam Islam, bahkan dalam konteks yang lebih terbatas seperti di Pulau Jawa. Misalnya, pentingnya memperhatikan cabang-cabang politiknya, terutama di Kesultanan Banten di Jawa Barat, merupakan suatu hal yang perlu ditekankan secara khusus.

Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa meskipun Islam memiliki peran yang penting dalam perkembangan politik Indonesia di daerah lain, menurut Benda, perannya paling signifikan di Jawa. Di sini, kelompok-kelompok Islam terlibat secara langsung dalam membentuk politik Indonesia secara keseluruhan.¹⁹

Dari tinjauan di atas, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Harry J. Benda mengadopsi pendekatan kajian kepustakaan dengan aspek deskriptif dan analisis sosio-historis, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh Syafi'i Ma'arif seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

KESIMPULAN

Ketika meninjau model kajian politik, kita dapat memperhatikan berbagai perspektif yang meliputi kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konstitusi, pendekatan dan sosialisasi politik, pemikiran politik, serta kebudayaan politik. Dalam makalah ini, dua tokoh yang menjadi fokus adalah Syafi'i Ma'arif dan Harry J. Benda. Syafi'i Ma'arif melakukan penelitian ini karena kebutuhan akan studi yang komprehensif mengenai dasar-dasar negara Indonesia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Pendekatannya juga didasarkan pada hipotesis sebagai berikut.

1. Dinamika perlahan namun pasti pergerakan Islam di Indonesia dari segi kuantitas ke kualitas.
2. Upaya untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, masih memerlukan pemahaman lebih dalam tentang arti Islam bagi individu dan kelompok.
3. Masa depan Islam di Indonesia tampaknya bergantung pada kemampuan intelektual Muslim, ulama, dan pemimpin Islam dalam memahami realitas masyarakatnya.

Sementara itu, Harry J. Benda menyimpulkan dalam kajiannya tentang dampak perang bahwa Islam di luar Pulau Jawa juga memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia (terutama Jawa) dan memainkan peran organisatoris yang signifikan. Ini mengarah pada pembentukan berbagai kelompok Islam yang secara aktif terlibat dalam politik Indonesia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Islam Dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LPJES, 1987.

¹⁹ Harry. J Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1985).

- Al-Bahi, Muhammad. *Pemikiran Islam Dan Pengembangannya*. Jakarta: Resalah, 1985.
- Al-Hasan Ali, Abi. *Al-Abkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyat*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960.
- Alfian. *Politik Kebudayaan Dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Benda, Harry. J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1985.
- Indonesia, Universitas Islam. "Menilik Isu Agama Dalam Dunia Politik." [uui.ac.id](http://www.uui.ac.id), 2021.
<https://www.uui.ac.id/menilik-isu-agama-dalam-dunia-politik/>.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Laila, Abu, and Muhammad Tohir. *Yaum Al-Islam*. Bandung: Rosa, 1987.
- Ma'arif, Syafi'i. *Studi Tentang Percaturan Konstituante Islam Dan Masalab Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ridwan. "Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 223-36.
- Sjadzali, Muunawwir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.